

# TINJAUAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT INDONESIA

(Perspektif Sosiologi Politik)

## Abstrak

*Berdasarkan kemanfaatan sosialisasi politik dapat diketahui bahwa suatu negara dapat menerapkan model sosialisasi politik yang berbeda-beda, bergantung kepada sistem-sistem politiknya. Suatu sistem politik dapat bersifat totaliter, demokrasi, sedangkan masyarakatnya dapat berada pada tahap primitif, berkembang, atau telah maju. Teori sistem-sistem dalam Sosiologi politik menunjukkan bahwa suatu kondisi sistem politik dapat dilihat dengan melihat fungsi masing-masing sistem yang ada, dan sifat suatu sistem politik yang menandai hubungan negara dan masyarakatnya dilihat dengan mengetahui tipologi sistem politik untuk melihat sifat negara dan struktur masyarakatnya.*

**Kata Kunci: Hubungan, Sosiologi, Politik**

## I. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi politik yang diberikan kekuasaan oleh masyarakat sebagai anggota negara untuk mengatur segala urusan yang terkait dengan pencapaian tujuan negara. Dalam hal ini tujuan negara adalah mencapai kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan menciptakan ketertiban bagi masyarakatnya, serta tujuan lain yang senantiasa terkait dengan kepentingan masyarakat suatu negara. John Locke mencetuskan ide untuk membagi kekuasaan tersebut kedalam tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Montesquie selanjutnya menyempurnakan ide tersebut dengan mensyaratkan prinsip *check and balance*, dalam pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Memahami latar belakang pencetusan ide pemisahan dan atau pembagian kekuasaan negara kedalam tiga cabang kekuasaan tersebut adalah sebagai berikut; *Pertama*, bahwa cabang kekuasaan legislatif diperlukan dalam rangka menjaga negara tetap pada tujuan awal pembentukannya dan kekuasaan tidak didominasi oleh satu atau

sekelompok orang. Secara akademik juga tergambar dengan jelas bahwa latar belakang adanya konsepsi perwakilan dalam ilmu politik yang meliputi lembaga-lembaga perwakilan yang beranggotakan para wakil rakyat, lembaga-lembaga politik seperti partai politik dan kelompok kepentingan yang merupakan lembaga penyeimbang kekuasaan negara dimaksudkan untuk menjamin bahwa negara akan senantiasa berjalan atas dasar kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Partai politik dan kelompok kepentingan adalah saluran untuk mengagregasi kepentingan masyarakat dan lembaga perwakilan adalah saluran untuk mengartikulasikan kepentingan tersebut.

*Kedua*, bahwa cabang kekuasaan eksekutif diperlukan untuk menyeimbangkan artikulasi kepentingan yang sangat beragam, sehingga eksekutif adalah cabang kekuasaan politik yang bersifat administratif yang mengatur lalu lintas kepentingan masyarakat yang sangat kompleks, dalam hal inilah eksekutif harus bebas dari unsur anggota-anggota lembaga-lembaga politik seperti partai politik ataupun kelompok kepentingan yang berfungsi untuk mengagregasi kepentingan masyarakat, sehingga prinsip *check and balance* dapat dijalankan. Masuknya unsur-unsur partai politik ataupun kelompok kepentingan kedalam kekuasaan eksekutif akan menimbulkan ketidakseimbangan dan prinsip *check and balance* tidak dapat dijalankan. Kompleksnya kepentingan masyarakat melahirkan sebuah lalu lintas kepentingan yang harus diatur agar keamanan dan ketertiban serta keadilan dapat terjaga pada saat kompetisi agregasi dan artikulasi kepentingan dilakukan.

Suatu lalu lintas agregasi dan artikulasi kepentingan oleh individu ataupun kelompok, oleh lembaga-lembaga politik tentu saja tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan atau pertikaian. Cabang kekuasaan yudikatif mempunyai kekuasaan dalam memutuskan perselisihan atau pertikaian tersebut baik oleh antar cabang kekuasaan sebagai lembaga negara atau antar individu sebagai anggota masyarakat atau warga negara. Dalam rangka mencapai

ketertiban dan keadilan maka aturan-aturan hukum dibuat sebagai pedoman bagi lembaga yudikatif untuk membuat keputusan, dan agar prinsip *check and Balance* dapat dijalankan maka cabang kekuasaan yudikatif ini harus bebas dari unsur partai politik ataupun kelompok kepentingan. Masuknya unsur-unsur partai politik ataupun kelompok kepentingan kedalam kekuasaan yudikatif akan menimbulkan ketidakseimbangan dan prinsip *check and balance* tidak dapat dijalankan.

Fenomena terkini, yang terjadi di Negara Indonesia yaitu setelah orde reformasi berjalan selama lebih dari satu dasawarsa adalah masuknya unsur partai politik dalam cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam jabatan-jabatan strategis dan mengepalai beberapa unit birokrasi. Menggunakan perspektif Sosiologi Politik tulisan ini hendak mengurai bagaimana hubungan antara Negara Indonesia dan masyarakatnya dengan berkembangnya fenomena semacam ini.

Saat ini Pemerintahan Negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintahannya dimulai sejak 20 Oktober 2014, dan ditandai dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang tentu saja diiringi dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok lainnya. Meskipun beberapa kelompok mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut, namun aksi tersebut tidak memberikan pengaruh yang cukup berarti. Kondisi perekonomian Negara Indonesia diperburuk dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, Presiden Soekarno diguncang kekuasaannya pada tingkat inflasi 650% pertahun Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenan pada level inflasi 77, 63% dengan nilai tukar rupiah Rp.8.000,- terhadap dollar Amerika Serikat. Prseiden SBY mengakhiri masa jabatan sampai habis masa jabatannya dan secara konstitusional, tetapi pada masa pemerintahannya gejolak perekonomian sangat mudah menyulut masyarakat untuk mengkritisi dan beraksi memprotes kebijakannya. Pada masa sekarang yaitu era Presiden Joko Widodo harga BBM naik sebesar 32% dan rupiah melemah sampai

level RP. 14.500,- dengan tingkat inflasi masih dibawah 10%, namun pemerintahan kabinet kerja masih dapat menjalankan pemerintahannya tanpa adanya gejolak yang berarti, meskipun faktor-faktor yang telah disebutkan tersebut bukan merupakan faktor penentu munculnya gejolak masyarakat terhadap kepemimpinan seorang presiden. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan rumusan masalah yang dapat diajukan adalah:

#### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pola hubungan antara negara dan masyarakat terbentuk?
2. Bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat Indonesia saat ini?
3. Bagaimana pengaruh masuknya unsur partai politik ke dalam cabang eksekutif dan yudikatif terhadap hubungan antara negara dan masyarakat?

#### SOSIOLOGI POLITIK SEBAGAI SUATU PERSPEKTIF

Sosiologi politik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memfokuskan kajian dan penelitiannya pada hubungan antara masalah-masalah politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik<sup>1</sup>. Dalam memahami gejala sosial dan politik dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara, sosiologi politik menerima segala kebaikan yang berasal baik dari pendekatan institutional maupun pendekatan behavioral, sehingga dalam sosiologi politik gejala sosial dipercayai sebagai bagian dari pola tingkah laku yang

---

<sup>1</sup> Michael Rush & Phillip Althoff, Pengantar Sosilogi Politik, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal: 5

konsisten, internal dan reguler dan dapat dilihat serta dibedakan, dan dapat disebut sebagai sistem sosial serta sejumlah subsistem-subsistem yang saling bergantung misalnya seperti ekonomi dan politik, masing-masing subsistem ini dapat terus dibelah atau dibagi lagi dan dikaji keterkaitan satu dan lainnya. Sosiologi politik melihat kejadian sedemikian tersebut adalah biasa, dan dikenal suatu teori dalam sosiologi politik yaitu teori sistem-sistem. Penganjur utama dari teori sistem adalah Talcott Parsons yang menulis buku *The Social System*<sup>2</sup> yang selanjutnya diidentifikasi oleh sebuah pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan fungsional terhadap teori sistem yang dikembangkan oleh salah satunya adalah Oran R. Young<sup>3</sup> yaitu mendefinisikan fungsi sebagai konsekuensi obyektif dari satu pola aksi dari sistemnya. Dengan demikian sesuai dengan pandangan Parson yang menyatakan bahwa satu sistem itu cenderung mencari sasaran khusus, dan bahwa semua tingkah laku dalam fenomena selalu berkaitan dengan tujuan tersebut, maka fungsionalisme struktural dapat membuktikan bahwa semua tingkah laku sosial dan semua gejala bisa memenuhi atau bisa pula gagal memenuhi fungsi-fungsi khusus bagi sistemnya

Sosiologi politik memberikan penekanan pada pendekatan fungsional struktural yaitu dalam hal perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan keberlangsungan suatu sistem politik untuk tetap bisa hidup ditentukan oleh proses yang berlangsung dalam lembaga-lembaga politik, teori ini dikembangkan oleh Gabriel Almond<sup>4</sup>, dan ditentukan pula oleh sumbangan-sumbangan tertentu atau masukan-masukan kepada sistem politik, analisa sistem politik dengan pendekatan ini disebut sebagai analisa masukan – hasil (*input-*

---

<sup>2</sup> Glencoe, Illinois, 1951

<sup>3</sup> Oran R. Young, *System of Political Science*, Englewood Cliffs, N.J., 1986, hal 29.

<sup>4</sup> Lihat Gabriel Almond dan G. Bingham Powell, *Comparative Politics: A developmental Approach*, Boston, Mass, 1966

*output*) yang dikembangkan oleh David Easton<sup>5</sup>. Menurut David Easton masukan-masukan tersebut dapat berupa tuntutan-tuntutan atau dukungan dan kemudian mengalami suatu proses konversi dalam bentuk keputusan atau kebijakan-kebijakan yang otoritatif.

Teori sistem-sistem yang diidentifikasi oleh pendekatan fungsionalisme struktural kemudian menggunakan konsep-konsep yang dianggap sentral dalam sosiologi politik. Konsep sentral tersebut adalah sosialisasi politik yaitu suatu konsepsi yang menjadi dasar untuk memperkenalkan sistem politik kepada individu dan masyarakat, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada, ditentukan pula oleh pengalaman-pengalaman serta kepribadian individu tersebut<sup>6</sup>. Dalam perspektif sosiologi politik, partisipasi dan rekrutmen adalah variabel bergantung dari sosialisasi politik sebagai variabel terikatnya. Dengan kata lain suatu masyarakat dapat melestarikan dirinya sendiri dengan jalan memberikan pengajaran atau pendidikan kepada anggota-anggota baru masyarakatnya mengenai nilai-nilai dan cara-cara bertingkah laku yang oleh masyarakat dianggap pantas dan dapat diterima. Konsepsi sosialisasi politik menekankan dengan cukup jelas bahwa variabel pengalaman dan kepribadian baik individu maupun kelompok adalah fundamental bagi proses sosialisasi dan bagi proses perubahan. Penekanan lainnya adalah terkait dengan instruksi yang merupakan bagian penting dari proses sosialisasi. Instruksi yang dimaksud adalah sama halnya dengan pengajaran yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang dianggap sebagai proses sosialisasi mengenai nilai dan tingkah laku sebagai penjelasan dari proses perubahan.

---

<sup>5</sup> dalam Michael Rush & Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal: 21

<sup>6</sup> Ibid hal 27

Negara merupakan suatu sistem politik yang dalam perspektif sosiologi politik dapat menggunakan konsepsi sosialisasi politik dalam rangka menyebarkan ideologi-ideologi resminya, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem pendidikan, keluarga, dan sistem sosial lainnya, kemudian memasukkan sejumlah ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, variabel dalam proses ini disebut sebagai instruksi yang merupakan satu dari tiga variabel penting dalam konsep sosialisasi politik. Dengan demikian sikap dan atau tingkah laku warga negara dalam perspektif Sosiologi Politik dapat ditentukan oleh proses sosialisasi politik melalui sistem-sistem tertentu yang ada dalam suatu negara. Keadaan masa depan suatu sistem politik ditentukan oleh proses sosialisasi<sup>7</sup> melalui berbagai tahap sejak dari awal masa kanak-kanak sampai tingkat paling tinggi dalam usia dewasa. Sikap-sikap politik, nilai-nilai dan tingkah laku politik dalam perspektif Sosiologi Politik diyakini terbentuk oleh pengalaman-pengalaman yang teratur yang dialami oleh individu, dan instruksi politik merupakan bagian yang sangat penting dalam sosialisasi politik karena berfungsi sebagai pengetahuan dan informasi yang dapat diterima oleh warga negara dan dapat mendahului pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap politik, dan dengan demikian dapat digunakan untuk mendukung suatu nilai khusus atau sikap khusus setelah nilai dan sikap tersebut terbentuk.

Berdasarkan kemanfaatan sosialisasi politik ini, suatu negara dapat menerapkan model sosialisasi politik yang berbeda-beda, bergantung kepada sistem-sistem politiknya. Suatu sistem politik dapat bersifat totaliter, demokrasi, sedangkan masyarakatnya dapat berada pada tahap primitif, berkembang, atau telah maju.

### **TIPE-TIPE SISTEM POLITIK**

---

<sup>7</sup> Opcid. Hal 37

Klasifikasi sistem politik dapat ditinjau sebagai suatu bentuk dasar dari konstruksi teori yang melibatkan generalisasi yang dibutuhkan untuk menempatkan suatu fenomena ke dalam golongan tertentu. Dengan demikian ia perlu menggunakan konsep-konsep yang mendefinisikan suasana politik, hakekat hubungan-hubungan dan lembaga-lembaga politik, negara, pemerintah, hukum, dan sebagainya<sup>8</sup>. Para ahli ilmu politik mengklasifikasikan sistem politik secara deskriptif yaitu membagi rejim-rejim politik seperti dibagi kedalam monarki dan republik, atau negara federal dan kesatuan. Para ahli sosiologi politik mengklasifikasikan sistem politik secara berbeda, yaitu ditinjau dari hubungan antara bentuk masyarakat dan tipe sistem politik itu sendiri. Dengan kata lain, dalam perspektif Sosiologi Politik sistem politik diklasifikasikan dengan menggunakan teori masyarakat, konsepsi evolusi dan perkembangan sosial.

Contoh konsepsi evolusi masyarakat yang menjadi dasar klasifikasi sistem politik adalah konsepsi yang dikemukakan oleh Herbert Spencer. Menurut Spencer masyarakat secara garis besar dapat dibedakan menjadi masyarakat militan dan masyarakat industri. Masyarakat militan adalah masyarakat yang aktivitasnya senantiasa berhubungan dengan pertahanan dan penyerangan. Pada masyarakat tipe ini kecenderungan pemusatan dan coercive control masih tinggi sehingga tipologi sistem politik pada masyarakat militan bersifat otoriter. Sebaliknya, pada masyarakat industri pemusatan dan coercive control cenderung menurun, digantikan oleh lembaga-lembaga perwakilan dan pengaturannya lebih terpecah, menurut Spencer terdapat pula kaitan yang erat antara jenis sistem ekonomi yang digunakan dengan tipologi sistem politik. Ekonomi kapitalis identik dengan sistem politik demokratis.

Karl Marx pun memberikan suatu sintesis bahwa bentuk masyarakat dipengaruhi oleh cara-cara produksi. Menurut Karl Marx

---

<sup>8</sup> Tom Bottomore, *Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hal. 54



perkembangan dan struktur masyarakat ditentukan oleh pembagian kerja dan bentuk-bentuk hak milik ditengah masyarakat. Sesungguhnya konsepsi Karl Marx tentang “mode Produksi” adalah suatu sketsa yang tidak pernah tuntas, menurut Tom Bottomore<sup>9</sup> terdapat empat pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh sketsa Marx yaitu; berapa banyakkah kiranya mode of production yang terdapat pada setiap tahap perkembangan; dalam keadaan seperti apa mode of production tersebut akan saling berhasil; bagaimana menerangkan rangkaian proses tentang bentuk masyarakat yang berhubungan dengan, muncul dari atau ditentukan oleh mode of production; dan bentuk negara serta sistem politik yang seperti apa yang dapat dicirikan atau dihasilkan oleh berbagai struktur dan bentuk ekonomi yang saling berbeda tersebut.

Meskipun demikian konsepsi Marxis digunakan sebagai dasar untuk menganalisa negara. Teori Marxis ini digunakan untuk menghubungkan tipe-tipe negara untuk membedakan struktur-struktur sosio ekonomis, untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam negara berdasarkan ciri masing-masing dari struktur bentuk masyarakat tertentu yang membahayakan transformasi struktural. Terdapat dua sudut pandang dengan menggunakan teori Marxis ini, yang pertama adalah sudut pandang non evolusionis, yang menjelaskan bahwa pembentukan negara merupakan konsekuensi dari transformasi struktural dari masyarakat komunal primitif, jenis-jenis negara yang berhubungan dengan *modes of production* ditentukan secara historis, dan kondisi-kondisi yang mengakibatkan transisi dari tipe yang satu ke tipe yang lain, karakteristik struktural, kontradiksi-kontradiksi yang dapat mempengaruhi transisi yang satu ke transisi yang lain tidak dapat diketahui. Pandangan yang kedua adalah sudut pandang evolusionis, bahwa jenis negara dan tinjauan terhadap hubungan negara dengan struktur masyarakat ditentukan secara evolusi oleh dua faktor sebagai berikut: *pertama*; perubahan

---

<sup>9</sup> Tom Bottomore, Sosiologi Politik, Rineka Cipta, 1992, hal. 58

pada mode of production yang menimbulkan beberapa dampaknya termasuk salah satunya adalah kesenjangan yang tajam dalam hal pemilikan harta benda sebagai akibat dari berkembangnya kekuatan-kekuatan produksi melalui kemajuan teknologi. *Kedua*; penaklukan yang memainkan peranan dalam penciptaan negara (tetapi untuk faktor kedua ini tidak ada penelitian terkait pengaruh perang, dan organisasi militer, atau penelitian terhadap konsekuensi membesarnya jumlah masyarakat).

Berlandaskan perspektif sosiologi politik mengenai tipologi sistem politik yang ditandai oleh hubungan antara negara dan struktur masyarakatnya, dapat disimpulkan bahwa secara sosiologi politik dapat dinyatakan bahwa besar dan kompleksnya masyarakat-masyarakat industri maju, beragamnya kepentingan di dalam masyarakat tersebut, kebutuhan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam produksi ataupun dibidang transport, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya, dan persaingan serta konflik internasional, keseluruhannya faktor tersebut penting bagi perluasan lingkup aktivitas negara didalam perundang-undangan, pemerintahan, penyelesaian sengketa antara individu dengan kelompok, dan penggalakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Kekuasaan politik dapat didesentralisir sampai tingkat tertentu, dibuat lebih demokratis, melibatkan partisipasi aktif sejumlah besar rakyat, serta dapat pula menjadi kurang coercive. Dengan demikian, dalam perspektif Sosiologi Politik dengan pendekatan skema evolusionis tergambar bahwa kecenderungan umum dalam pembangunan sistem politik tidak dapat dihindari, dan hubungan antara masyarakat dan negaranya ditentukan oleh perjalanan sejarah masyarakat itu sendiri, dalam masyarakat kapitalis misalnya hubungan antara masyarakat dan negara ditentukan oleh perkembangan mode produksi, namun konsepsi ini tepat digunakan pada masyarakat kapitalis, tidak semua negara menganut kapitalisme dalam sistem politiknya, dengan kata lain tipologi sistem politik juga ditentukan oleh tipologi masyarakatnya.

Memperjelas uraian tersebut terdapat dua teori untuk menjelaskan hubungan masyarakat dan negaranya dalam cakupan suatu sistem politiknya, yaitu sebagai berikut: *pertama*, negara ada karena semakin meningkatnya diferensiasi di dalam fungsi-fungsi sosial ketika masyarakat manusia membesar dan kompleks, dan pada kebutuhan akan kekuasaan yang lebih tinggi di dalam masyarakat dengan mana mereka sanggup mengatur konflik-konflik kepentingan diantara individu dengan kelompok dan menampilkan dengan cara tertentu berbagai kepentingan umum. *Kedua*, negara timbul sebagai suatu sarana dominasi yang berasal baik dari adanya diferensiasi internal masyarakat kedalam kelas-kelas dominan dan kelas-kelas subordinat (sesuai dengan teori Marxis), ataupun yang berasal dari pemberian peraturan oleh sekelompok orang terhadap orang lainnya melalui penaklukan<sup>10</sup>.

Menggunakan perspektif ini juga dapat dijelaskan mengenai sifat negara, bahwasannya sifat negara tidak dapat terlepas dari lingkungan sosial lainnya, atau sebaliknya takluk terhadap konstelasi kepentingan, dimana kepentingan itu sendiri harus dispesifikasikan, kemudian tingkat sejauh mana negara menjadi lembaga suatu lembaga represif yang mendominasi masyarakat dan apa yang menjadi sumber dominasi tersebut. Sesuai dengan tipologinya yang ditandai dengan hubungan antara negara dan masyarakatnya negara bisa saja bersifat sebagai “negara penjaga malam”, atau “negara kesejahteraan, negara developmentalist atau negara intervensionist”.

Dengan demikian, dalam rangka menentukan sifat hubungan antara masyarakat dan negara, sejarah perubahan politik suatu negara sangat menentukan. Perubahan politik dapat didorong oleh konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, dalam Teori sejarah Marxis konflik politik dalam masyarakat terutama masyarakat

---

<sup>10</sup> Tom Bottomore, *Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 70

Kapitalisme dapat terjadi akibat adanya eksistensi suatu kelas sosial dalam masyarakat yang mendorong perubahan politik, atau akibat konflik yang terjadi antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Digunakannya Teori Sejarah Marxisme dalam mencari pola hubungan antara masyarakat dan negara, dengan demikian menghadirkan pula konsep antitesis dan sistesis antara liberalisme dan sosialisme, bahwa ketika masyarakat Kapitalis sampai pada tahap puncak pertentangan masyarakatnya, maka Sosialisme dapat muncul sebagai sintesis, dan negara akan bersifat sebagai negara intervensionist, namun dapat pula sebagai negara kesejahteraan<sup>11</sup>.

### **SEJARAH PERUBAHAN SISTEM POLITIK INDONESIA**

Setelah memproklamkan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945, Negara Indonesia dipimpin oleh Soekarno-Hatta, para ahli sejarah memberi nama untuk masapemerintahan ini dengan nama orde lama. Pada orde ini struktur masyarakat Indonesia masih bersifat feodalistik, atau dapat disebut pula tradisional, dan sistem politiknya pun masih bersifat feodal.

Perjalanan sejarah orde lama dengan sifat feodalistiknya diuraikan oleh Anwar Harjono, dalam buku Perjalanan Politik Bangsa<sup>12</sup>, bahwasannya sejak berdirinya, seperti sistem politik monarkhi yang dibungkus oleh sistem pemerintahan republik, organ-organ politik yang menjadi saluran untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan bercorak feodal yaitu; *pertama*, gagasan yang digunakan adalah gagasan daulat tuanku; *kedua*, proses rekrutmen tidak memiliki kualifikasi objektif; *Ketiga*, tidak ada komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama.

---

<sup>11</sup> Valentinus Saeng, CP. *Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, PT. Gramedia, Jakarta, 2012. Hal. 116 – 146.

<sup>12</sup> Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hal 69 - 71

Masyarakat Indonesia yang memahami dirinya sebagai pemilik dari Negara Indonesia secara bersama-sama, sistem politik yang dibangun menggunakan prinsip-prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat Indonesia sendiri atau dikenal sebagai demokrasi tidak menjadi subjek dalam perubahan politik. Sejarah pergolakan politik di Negara Indonesia menunjukkan hal ini. Pada awal kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem kabinet parlementer<sup>13</sup>. Dalam sistem kabinet parlementer, kabinet yang akan membantu menjalankan kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan disusun oleh parlemen, dan komposisi parlemen disusun berdasarkan perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum. Jumlah suara partai politik tersebut menentukan jumlah kursi partai politik di parlemen. Pada masa ini partai politik adalah penentu perubahan, tetapi proses kaderisasi tidak berjalan demokratis.

Selain sistem parlementer, Indonesia pernah pula beralih ke sistem Liberalisme, yakni ketika Indonesia diubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Tahun 1949, namun tampaknya Sistem itu tidak sesuai dengan sejarah kelahiran Bangsa Indonesia, kemudian Indonesia berubah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia ini secara jelas dapat diketahui setelah rejim pemerintahan beralih dari dari orde lama ke orde baru, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Negara Indonesia pada masa Pemerintahan Orde Baru bersifat sebagai *Negara Penjaga Malam*, negara sangat dominan dan bertindak secara regresif terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dinilai pemerintah akan mengurangi dominasi pemerintah. Struktur masyarakat lebih bersifat kepada masyarakat yang tradisional, diferensiasi masyarakat baik dalam hal ekonomi maupun dalam kehidupan sosialnya belum begitu tinggi.

---

<sup>13</sup> ibid, 50-128

Perkembangan selanjutnya pada Tahun 1998, terjadi perubahan politik di Indonesia. Meskipun secara tersurat dapat disaksikan bahwa perubahan tersebut terjadi didorong oleh konflik antara kelompok mahasiswa dan pemerintah, tetapi setelah rejim orde baru digantikan oleh rejim reformasi, kelompok-kelompok sosial yang selanjutnya memimpin dalam kehidupan sosial adalah kelompok-kelompok yang di dalam masyarakat berstatus sebagai pemilik modal, tuan tanah, dan sejenisnya, hal ini dapat dilihat sewaktu akan dilakukan pemilihan kepala daerah, kesadaran mata pilih untuk memilih lebih cenderung karena dipengaruhi oleh tindakan politik uang oleh calon bukan karena kesadaran terhadap kualitas pemimpin yang akan mereka pilih, dan berkelindan dengan hal itu calon-calon yang menang pun sebagian besar adalah pemilik perusahaan-perusahaan besar, dan tuan-tuan tanah.

Fenomena semacam ini terjadi di semua lini organ politik, dicabang *eksekutif*, pemerintahan dijalankan atas dasar gagasan suka tidak suka atau gagasan daulat tuan ku, di cabang *legeslatif* gagasan semacam ini juga menjadi landasan dalam penunjukkan wakil-wakil yang akan bertempur di pemilihan umum tidak berdasarkan kualifikasi objektif, melainkan atas dasar restu dari pimpinan partai, dan suatu partai terutama yang muncul di orde reformasi kejayaannya bergantung kepada kejayaan pendiri utamanya. Berkelindan dengan kondisi ini jabatan-jabatan di pemerintahan adalah hasil penghitungan kerjasama antar partai yang telah bersepakat dalam suatu koalisi, dengan kata lain koalisi di *legeslatif* turut menjadi penentu rekrutmen untuk jabatan di *eksekutif*, lebih jauh lagi saat ini koalisi tersebut juga menjadi penentu untuk rekrutmen jabatan di cabang *yudikatif*. Dengan demikian pada dasarnya tipologi sistem politik Negara Indonesia tidak berubah, masih sama sejak kemerdekaannya sampai sekarang. Negara masih bersifat sebagai Negara “penjaga malam” atau negara “*intervensionist*”.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bottomore, Tom, Sosiologi Politik, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Harjono, Anwar, Perjalanan Politik Bangsa, Gema Insani Press, Jakarta, 1997

Saeng, Valentinus CP, Perang Smesta Melawan Kapitalisme Global, Gramedia, Jakarta, 2012

Rush, Michael dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 1995.